

PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN



LAPORAN

AKUNTABILITAS KINERJA

INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

KECAMATAN BASA AMPEK BALAI TAPAN

TAHUN 2018

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018 dapat diselesaikan.

Penyusunan LAKIP merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999, untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan kepada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dalam mengelola perencanaan pembangunan daerah.

Dengan telah tersusunnya LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2018 ini, maka kami menyampaikan terimakasih kepada narasumber yang telah banyak membantu hingga selesainya penyusunan LAKIP ini. Kami juga menyampaikan terimakasih kepada pelaksana kegiatan yang bekerja secara maksimal dalam melaksanakan kegiatan selama tahun 2018.

Penyusunan LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini telah diupayakan sebaik mungkin, walaupun demikian LAKIP Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi. Namun demikian Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan telah mengupayakan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut melalui koordinasi dengan pelaksana kegiatan. Semoga Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan ini telah dapat mencerminkan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Tapan, 20 Februari 2018

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

IKHTISAR EKSLUSIF

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. LatarBelakang
- 1.2. LandasanHukum
- 1.3. Tujuan
- 1.4. Gambaran Umum
- 1.5. SistematikaPenyajian

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- 2.1. RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan 2016 – 2021
- 2.2. Visidan Misi Kecamatan
- 2.3. Penetapan Kinerja 2017

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018
- 3.2. Evaluasidan Analisa Pencapaian Kinerja
- 3.3. AkuntabilitasKeuangan

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- (1) Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2018
- (2) Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2018

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan	7
---	---

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah
Tabel 2.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2018.....
Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018.....
Tabel 3.1. Pencapaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018
Tabel 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

IKHTISAR EKSLUSIF

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan selama Tahun 2018 .Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2018 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahun organisasi.

Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2018 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara sasaran dengan indikator kerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator

outcomes atau minimal *output* dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang diinginkan.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Kecamatan Basa Ampek Balai tahun 2018 dengan jumlah keseluruhan sasaran sebanyak 6 (enam) sasaran dengan kategori capaian sasaran sangat berhasil sebanyak enam (enam) sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa capaian seluruh sasaran program Kecamatan Basa Ampek Balai Tahun 2018 telah mencapai target yang telah ditetapkan dengan harapan semoga di tahun mendatang dapat dipertahankan dan lebih ditingkatkan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi yang harus diupayakan semaksimal mungkin dalam pencapaiannya.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. GAMBARAN UMUM

Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah pada tanggal 19 Maret 1956 oleh Presiden Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat sebagai kepala Kecamatan. Pemerintah Kecamatan mempunyai tugas pokok untuk melaksanakan sebagai kewenangan Bupati di wilayah kerjanya berdasarkan pelimpahan wewenang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah bagian dari pada perencanaan dan merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. LAKIP merupakan salah satu barometer untuk mengetahui sejauh mana upaya peningkatan kinerja aparatur pemerintah telah dilaksanakan. LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Laporan ini memuat hasil pengukuran sasaran strategis organisasi dan program/kegiatan melalui indikator kinerja (parameter) yang telah ditetapkan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Indikator kinerja sasaran strategis organisasi merupakan parameter untuk mengukur keberhasilan pelayanan yang dilaksanakan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan. Indikator kinerja sasaran strategis ini menggunakan indikator kinerja output dan atau outcome dari kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas. Indikator kinerja

kegiatan menggunakan indikator kinerja mulai dari masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) sesuai yang telah disepakati dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Hasil pencapaian kinerja tahun 2018 secara umum menunjukkan bahwa Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah dapat melaksanakan visi, misi, sasaran, kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Namun demikian masih terdapat hal-hal yang harus mendapatkan perhatian untuk peningkatan pencapaian kinerja ditahun berikutnya.

Walaupun evaluasi kinerja sudah dilakukan dengan baik dengan pencapaian 90,77 % akan tetapi ada beberapa hambatan yang perlu diperhatikan seperti kurangnya sarana dan prasarana serta sumber daya manusia.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Lakip Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan mengacu kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

1.3. Tujuan

Dalam penyusunan LAKIP ini bertujuan sebagai berikut :

1. Adanya keluaran berupa dokumen LAKIP kecamatan Basa Ampek Balai Tapan;
2. Tersedianya media pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi;
3. Terwujudnya *clean government* dan *good governcce* pada Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

1.4. Gambaran Umum

Kantor camat Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah nomor 16 tahun 2010 tanggal 30 Nopember 2010. Susunan organisasi terdiri dari Kepala Kecamatan (Camat) yang saat ini dijabat oleh **AHMAD HIDAYAT,S.STP.MSc** , Sekretaris Kecamatan, Kasi Pemerintahan, Kasi Trantib, Kasi Pelayanan, Kasi Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian, Kasi Kesejahteraan Rakyat, Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan, dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang berada dibawah kesekretariatan.

Sebagai tindak lanjut Perda tersebut diatas, dalam rangka menentukan tugas pokok dan fungsinya telah diatur dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2010.

1.4.1. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Tugas pokok dan fungsi secara umum merupakan hal-hal yang harus dan wajib dikerjakan seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara

rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi.

Tugas pokok dan fungsi kecamatan merupakan suatu kesatuan yang saling terkait, adapun tugas pokok dan fungsi kecamatan Basa Ampek Balai Tapan antara lain :

A. Tugas Pokok

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan memiliki tugas dimana camat sebagai pemerintah daerah ditingkat kecamatan mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan bupati dan tugas pemerintahan lainnya.

B. Fungsi Kecamatan

Dalam melaksanakan tugas tersebut, kecamatan Basa Ampek Balai Tapan menyelenggarakan fungsi :

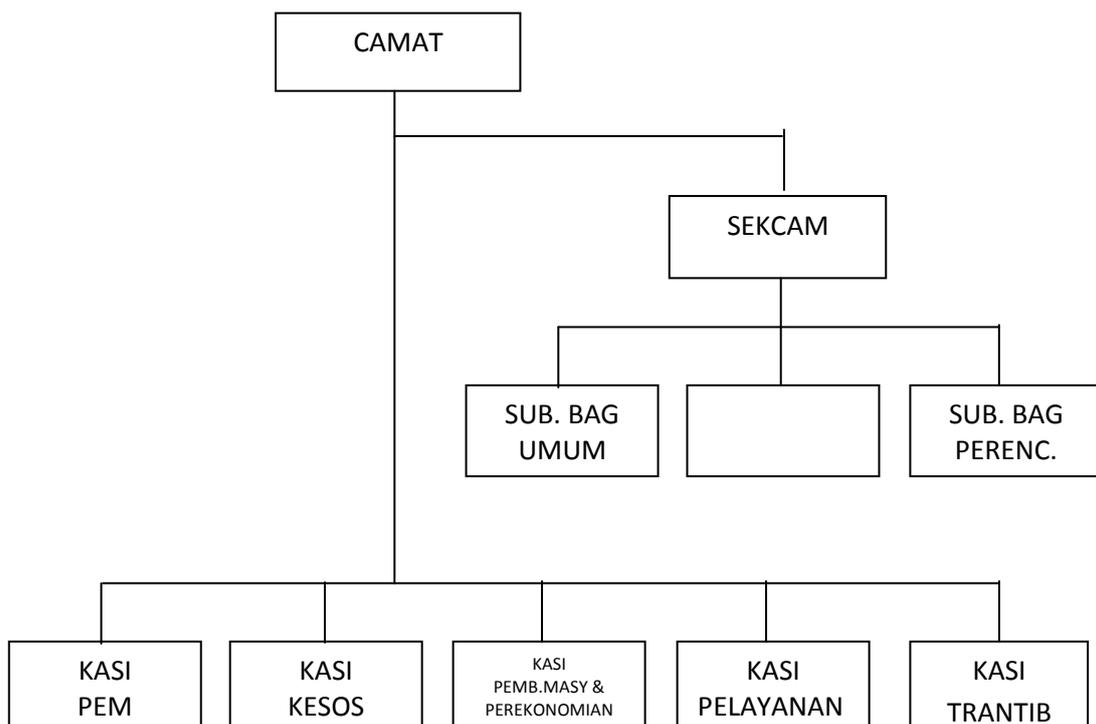
- 1) Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 2) Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data dibidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketentraman, dan ketertiban umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial;
- 4) Pelaksanaan inventarisasi asset daerah atau kekayaan daerah yang ada diwilayah kecamatan serta pemeliharaan dan pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;

1.4.2. Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kecamatan Basa Ampek Balai Tapan, susunan organisasi dan tata kerja tersebut, sesuai Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 60 tahun 2010, Struktur Organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Kepala Kecamatan;
- b. Sekretaris Kecamatan;
 - i. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
 - ii. Sub Bagian Perencanaan , Keuangan dan Pelaporan.
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Trantib
- e. Seksi Pembangunan Masyarakat dan Perekonomian;
- f. Seksi Kesejahteraan Masyarakat
- g. Seksi Pelayananana.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan



1.4.3. SUMBERDAYA APARATUR

Sumber daya aparatur Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan pada tahun 2018 berjumlah 12 orang PNS termasuk 2 orang tenaga Kontrak dan 5 orang tenaga sukarela dengan klasifikasi sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan golongan ruang
 - a) Golongan IV : 1 orang
 - b) Golongan III : 10 orang
 - c) Golongan II : 1 orang
 - d) Kontrak : 2 orang
 - e) Sukarela : 5 orang
- 2) Berdasarkan pendidikan
 - a) Pasca Sarjana : 2 orang
 - b) S1 : 10 orang
 - c) SLTA : 7 orang
- 3) Berdasarkan jabatan
 - a) Eselon III : 2 orang
 - b) Eselon IV : 7 orang
 - c) Tenaga administrasi : 3 orang
 - d) Tenaga Kontrak : 2 orang
 - e) Tenaga Sukarela : 7 orang

Sistematika Penyajian

Pada dasarnya LAKIP ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan selama tahun 2018. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2017 sebagai berikut :

IKHTISAR EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah

mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB. I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan informasi umum tentang instansi serta uraian singkat mandat apa yang dibebankan kepada instansi.

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana hasil yang akan dicapai organisasi dalam jangka menengah (strategis), dalam Rencana Jangka Tahunan (RKT) dan dalam Penetapan Kinerja (PK).

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kabupaten Pesisir Selatan yang dituangkan kedalam RPJMD tahun 2016 – 2021 dimana kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai satuan kerja perangkat daerah kabupaten Pesisir Selatan telah merencanakan strategi-strategi yang dituangkan dalam renstra tahun 2016 – 2021 untuk membentuk dan mewujudkan visi Bupati Pesisir Selatan dan menetapkan kinerja 2018.

2.1 RENCANA STRATEGIS

2.1.1 Visi

Visi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 adalah :

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI,
UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

- Mandiri : berdiri sendiri yaitu kondisi dimana daerah dapat memenuhi kebutuhan pembangunan dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki daerah secara optimal
- Unggul : masyarakat yang memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehingga menjadi masyarakat yang unggul
- Agamis : suatu kondisi masyarakat dapat mempelajari, memahami, melaksanakan dan mengamalkan ajaran agamanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan adat.
- Sejahtera : perlu sejumlah program akselerasi untuk bisa mendorong peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Pesisir Selatan terutama dibidang Pendidikan, Kesehatan, dan meningkatkan daya beli masyarakat

Berkaitan dengan pernyataan visi pembangunan lima tahun ke depan, maka untuk **MEWUJUDKAN MASYARAKAT KABUPATEN PESISIR SELATAN YANG MANDIRI, UNGGUL, AGAMIS DAN SEJAHTERA** dilaksanakan melalui 5 (lima) Misi yaitu :

1. Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah.
3. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan.
4. Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan
5. Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang

Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang.

Misi kesatu, Melaksanakan reformasi birokrasi dengan aparatur yang bersih dan responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tujuan :

1. Meningkatkan kinerja administrasi pemerintahan.
2. Meningkatkan kinerja pelayanan publik.
3. Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.
4. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
5. Meningkatnya pengelolaan arsip daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Meningkatkan produktivitas masyarakat.
7. Mengoptimalkan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Misi kedua, Meningkatkan pembangunan infrastruktur perekonomian dan infrastruktur sosial yang terkait dengan sektor unggulan daerah. Tujuan :

1. Mengembangkan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
2. Memantapkan pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana.
3. Memantapkan pemanfaatan dan penataan ruang wilayah darat dan laut termasuk pertanahan secara terpadu dan konsisten.

Misi ketiga, Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun, toleran dan mengembangkan nilai-nilai budaya ABS-SBK. Tujuan :

1. Memperkuat ketahanan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan keutamaan nilai - nilai luhur budaya lokal yang inklusif.

2. Memperkuat modal social dan budaya masyarakat.
3. Mengembangkan tatanan politik dan pemerintahan yang bertumpu pada profesionalisme, penghormatan terhadap hakasasi manusia, kearifan local dan peningkatan kesejahteraan rakyat.

Misi keempat, Meningkatkan produksi dan nilai tambah dengan tetap mengedepankan pembangunan berkelanjutan Tujuan :

1. Mengembangkan Pertanian pangan serta perikanan dan kelautan yang produktif dan bernilai tambah tinggi.
2. Mengembangkan industri pengolahan yang berdaya saing terutama industri pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
3. Mengembangkan koperasi, UMKM dan industri yang berdaya saing terutama dalam pengolahan hasil pertanian, perikanan dan kelautan.
4. Mengembangkan wisata daerah.

Misi kelima, Meningkatkan peran struktur sosial dalam rangka mengurangi tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat-obat terlarang. Tujuan :

1. Memantapkan tata kehidupan masyarakat yang aman, damai, tertib, taat hukum dan harmonis.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 maka prioritas pembangunan dititikberatkan untuk tetap melanjutkan program yang belum sepenuhnya dapat dilaksanakan dan dicapai pada tahun 2010-2015 serta disinkronkan dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RPJM Nasional Tahun 2015-2019 dan memperhatikan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005-2025, maka prioritas pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

Pelaksanaan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan pelayanan prima.

1. Pembangunan infrastruktur penunjang ekonomi rakyat berbasis lingkungan hidup dan kebencanaan.
2. Pengembangan kawasan perdesaan dan kawasan ekonomi strategis.
3. Peningkatan akses dan kualitas pendidikan.
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat Pesisir Selatan.
5. Pengamalan agama, pelestarian budaya dan kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat berdasarkan ABS-SBK.
6. Peningkatan ekonomi pangan berbasis komoditi lokal yang berdaya saing.
7. Peningkatan daya tarik, pemasaran, industri dan kelembagaan pariwisata.

8. Penurunan Tingkat kemiskinan dan pengurangan angka pengangguran.

10. Pencegahan tingkat kejahatan, kriminalitas dan peredaran obat terlarang.

2.1.2 Telaahan Recana Strategis

Beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi penyelenggaraan tugas dan fungsi pada kantor Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan antara lain :

- a. Masih kurangnya jumlah sumber daya aparatur kecamatan dalam rangka mendukung optimalisasi penyelenggaraan kegiatan;
- a. Belum tersedianya sumber daya aparatur dengan kemampuan teknis tertentu, antara lain: perencana, pengelola anggaran / pembukuan, teknik bangunan dan lain-lain sumber daya keprofesionalan;
- b. Masih lemahnya sebagian besar kualitas sumber daya aparatur pemerintahan nagari;
- c. Dukungan anggaran yang belum memadai, sehingga kegiatan yang terlaksana belum berjalan secara optimal;
- d. Masih lemahnya koordinasi pelaksanaan tugas antar seksi;
- e. Masih terdapatnya jalan penghubung antar wilayah dalam satu kecamatan yang kurang memadai;
- f. Masih lemahnya partisipasi kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan;
- g. Keberadaan Pusat Pemerintahan atau Pelayanan administrasi kependudukan yang cukup jauh, sehingga mempersulit masyarakat yang membutuhkan pelayanan

2.1.3. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Sebagai modal dasar bagi perwujudan Visi dan Misi Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan adalah letak geografis Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Pesisir Selatan termasuk wilayah pengembangan lingkaran luar sehingga pertumbuhan Kabupaten Pesisir Selatan mengarah ke Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan baik dari sisi ekonomi, industri, jasa dan pariwisata.

Sebagai wilayah lingkaran luar, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan kaya akan potensi wilayah yang perlu dilestarikan dan dikembangkan, seperti potensi wisata alam seperti “air manca” di Nagari Rantau Simalenang dan Wisata Pantai di Nagari Muaro Gadang Air Haji.

Berdasarkan kajian lingkungan hidup strategis bahwa wilayah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan

berupakan wilayah dataran rendah terdiri dari sumberdaya alam, hutan, ekosistem yang menunjang keberlangsungan makhluk hidup utamanya manusia sehingga perlu adanya pelestarian alam, reboisasi, pelestarian sumber air, mempertahankan fungsi lahan konservasi, pengendalian perkembangan permukiman pada lahan hijau dan analisis dampak lingkungan.

2.1.4 Penentuan Isu-Isu Strategis.

- a. Kurangnya Sumber daya aparatur kecamatan dalam memberikan pelayanan publik.
- b. Kurangnya jumlah pegawai di kecamatan yang mengakibatkan pelayanan kurang maksimal.
- c. Kurangnya jumlah sarana dan prasarana yang ada di Kantor Camat Basa Ampek Balai Tapan sehingga pelayanan terhadap masyarakat terhambat.
- d. Pelayanan prima Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar – benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku seiring dengan program pemerintah mengenai pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN).
- e. Lemahnya kompetensi sumber daya aparatur kecamatan dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing – masing.
- f. Lemahnya pelayanan fungsi dan tugas pokok di Kecamatan sehingga penilaian kinerja aparatur pemerintahan kurang.
- g. Lambatnya Peranan Fungsi Kelembagaan di Masyarakat akibat kurang koordinasi yang baik dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah kecamatan.
- h. Masih kurangnya jumlah pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat sebagai penyelenggara umum pemerintahan dan pelaksana pelayanan di Kecamatan.
- i. Sering terjadinya kesemrautan administrasi yang bersifat multi sektor yang banyak terjadi di wilayah perbatasan, sehingga dianggap perlu dibuat tugu batas antar kecamatan.
- j. Kurang tergalinya Potensi Wisata yang ada dikarenakan kurangnya promosi serta lemahnya kesadaran masyarakat sekitar dalam menjaga objek-objek wisata yang ada.

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran Pada Tahun ke-					
				2016	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Melaksanakan Reformasi birokrasi dengan Aparatur yang bersih, responsif dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.	1.Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.	1.Indeks kepuasan Masyarakat	60 %	70 %	75 %	80 %	85 %	95 %
		a. Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP	a.Persentase masyarakat yang melakukan perekaman e-KTP	50 %	70 %	-	-	-	-
		b. Peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	b. Terpenuhinya pelayanan PATEN kepada Masyarakat (tingkat kepuasan masyarakat)	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %	100 %
		c.Peningkatan Fasilitasi kegiatan di Kecamatan	c.Jumlah kegiatan yang fasilitasi	10 keg	15 keg	20 keg	25 keg	30 keg	35 keg
		d.Memberikan Pelayanan dengan cepat	d.Melakukan perampingan jalur dalam waktu pelayanan (SOP)	10 Nag	10 Nag	10 Nag	10 Nag	10 Naga	10 Nag
		2.Meningkatnya kualitas pemerintahan Nagari	2.Persentase Pengelolaan Pemerintahan Nagari yang Baik	60 %	70 %	80 %	90 %	95 %	100 %
		a.Peningkatan Pengelolaan Keuangan Nagari	a.Jumlah Nagari yang pengelolaan keuangan yang Baik	6 Nag	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag
		b.Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	b.Jumlah Nagari yang pengelolaan Pemerintahan yang baik.	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag	10 Nag

1) Indikator Kinerja Utama (IKU)

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama secara berjenjang. Penetapan IKU telah mengacu pada RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2016 – 2021. IKU ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang memiliki fokus pada perspektif *stakeholder*, sedangkan yang fokusnya pada *internal bussines prosestidak* dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama. IKU kecamatan Basa Ampek Balai Tapan yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2016 – 2021 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan
Tahun 2016-2021

Indikator Sasaran	Satuan	Target					
		2016	2017	2018	2019	2020	2021
a. Peningkatan pelayanan perekaman E-KTP	Masyarakat	50 %	70 %	-	-	-	-
b. Peningkatan pelayanan Administrasi Terpadu (PATEN)	Masyarakat	70 %	70 %	80 %	80 %	90 %	100 %
c. Peningkatan Fasilitasi kegiatan di kecamatan	Kegiatan	10 keg	15 Keg	20 Keg	25 Keg	30 Keg	35 Keg
d. Memberikan pelayanan dengan cepat	Nagari	10 Nag					
Meningkatkan kualitas pemerintahan Nagari							
a. Peningkatan pengelolaan keuangan Nagari	Nagari	6 Nag	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag
b. Peningkatan Pengelolaan Pemerintahan Nagari	Nagari	7 Nag	8 Nag	9 Nag	10 Nag	10 Nag	10 Nag

2. Penetapan Kinerja 2018

Penetapan Kinerja merupakan amanat inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Kinerja. Penetapan Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan sebagai dasar pemberian *reward* atau penghargaan dan sanksi.

Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah membuat penetapan kinerja tahun 2018 secara berjenjang sesuai dengan tugas dan fungsi yang ada, penetapan kinerja ini telah mengacu pada RPJMD tahun 2016 – 2021. Penetapan Kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Penetapan Kinerja Tahun 2018

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
I	Terlayannya Administrasi Perkantoran		100%
1	Tersedianya jasa surat menyurat	Terpenuhinya honor pramu kantor	100 %
2	Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terpenuhinya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%
3	Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	100%
4	Tersedianya jasa kebersihan kantor	Tersedianya jasa kebersihan kantor	100%
5	Tersedianya kebutuhan ATK untuk Adm. kantor dalam satu tahun	Tersedianya kebutuhan ATK untuk Adm. kantor dalam satu tahun	100%
6	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	100%
7	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	100%
8	Tersedianya bahan bacaan dan	Terpenuhinya bahan bacaan dan	100%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
	peraturan perundang-undangan	peraturan perundang-undangan	
9	Tersedianya makanan dan minuman	Terpenuhinya kebutuhan makanan dan minuman	100%
10	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	100%
11	Terwujudnya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	Terlaksananya rapat-rapat dan koordinasi dalam daerah	100%
II	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur		100%
1	Tersedianya perlengkapan rumah jabatan/dinas	Terpenuhinya Perlengkapan rumah jabatan/dinas	100%
2	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Tersediannya peralatan gedung kantor	100%
3	Pemeliharaan rutin berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpeliharanya Peralatan/Perlengkapan Kantor	100%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Terpeliharanya Gedung Kantor	100 %
5	Terpeliharanya kendaraan dinas penunjang pelaksanaan tugas	Terpeliharanya kendaraan dinas penunjang pelaksanaan tugas	100%
III	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		100 %
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	Tersusunnya Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD	100 %
IV	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		100 %
1	Fasilitasi Masalah Trantib dan Pertanahan	Terfasilitasi masalah trantib dan pertanahan	100 %
V	Terselenggaranya Pengembangan Wawasan Kebangsaan		100%
1	Pelaksanaan Upacara HUT RI	Terlenggaranya Upacara HUT RI	100 %
VI	Terwujudnya Pengembangan Pariwisata		100%
1	Terselenggaranya Festival Langkisau	Terlaksananya Festival Langkisau	100%
VII	Tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa/Nagari		100 %
1	Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Keuangan Pemerintah Nagari	Terlaksananya Pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari	100%
2	Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari	Terlaksananya Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari	100 %
VIII	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial		100 %

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Keikutsertaan MTQ Tingkat Kabupaten	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten	100 %
IX	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan		
1	Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK dan Jambore Kecamatan	100%
2	Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan	100%
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	100%
4	Terwujudnya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan	Terlaksananya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahanyang paling bawah (Kampung)	100%
5	Terwujudnya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Telaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	100%
X	Terwujudnya Pemberdayaan Produk Unggulan Kecamatan		100%
1	Terbinanya Produk Unggulan Kecamatan	Munculnya Produk Unggulan Kecamatan	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah.

Pemerintah kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan selaku pengemban amanah masyarakat kabupaten Pesisir Selatan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan yang dibuat sesuai ketentuan yang terkandung dalam Inpres Nomor 7 tahun 1999 mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang perbaikan pedoman penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan- keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2018.

3.1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2018

Mengacu pada ketentuan yang berlaku dalam Impres No. 7 tahun 1999 dan keputusan Kepala LAN No. 239/ IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003, tentang perbaikan pedoman penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah, Kinerja Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan diukur berdasarkan Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai Tingkat Pencapaian Sasaran dan Program/ kegiatan dilakukan Melalui media Rencana Kinerja yang dibandingkan dengan realisasinya. Tingkat capaian kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Tahun 2018 berdasarkan hasil pengukurannya dapat diilustrasikan dalam table sebagai berikut :

Tabel. 3.1. Pencapaian indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Pencapaian Rencana Target	Ket
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Terlayannya Administrasi Perkantoran						
1	Tersediannya Jasa surat menyurat	Tebayarnya Jasa pramu kantor	%	100	77,00	77,00	Cukup
2	Tersediannya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya jasa listrik dan Speedy	%	100	99,98	99,98	Sangat Baik
3	Tersediannya Jasa Administrasi Keuangan	Terpenuhinya Jasa Administrasi Keuangan	%	100	99,44	99,44	Cukup
4	Tersediannya jasa kebersihan kantor	Tersediannya peralatan kebersihan kantor	%	100	75,87	75,87	Cukup
5	Tersediannya kebutuhan ATK untuk Adm. kantor dalam satu tahun	Tersediannya kebutuhan ATK untuk Adm. kantor dalam satu tahun	%	100	100,00	100,00	Sangat Baik
6	Tersediannya Barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetakan dan penggandaan	%	100	69,98	69,98	Kurang
7	Tersediannya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	%	100	76,77	76,77	Cukup
8	Tersediannya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Terpenuhinya bahan bacaan Singgalang, Padang Expres dan Pos Metro	%	100	66,18	66,18	Kurang
9	Tersediannya makanan dan minuman	terpenuhinya makanan dan minuman pada saat rapat dan makan minum tamu	%	100	99,94	99,94	Sangat Baik

10	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	%	100	86,01	86,01	Baik
11	Tercapainya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	Tersedianya biaya perjalanan dinas dalam mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah	%	100	98,97	98,97	Sangat Baik
II	Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur						
1	Terpenuhinya perlengkapan rumah dinas/jabatan	Tersedianya perlengkapan rumah dinas/jabatan	%	100	97,41	97,41	Sangat Baik
2.	Terpenuhinya pengadaan peralatan gedung kantor	Tersedianya peralatan gedung kantor	%	100	99,80	99,80	Sangat Baik
3.	Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Tersedianya biaya service printer dan laptop serta mesin ginset	%	100	60,08	60,08	Kurang
4.	Terpeliharanya rumah dinas/jabatan	Rumah dinas/jabatan lebih nyaman untuk dihuni	%	100	56,25	56,25	Kurang
5.	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	%	100	99,93	99,93	Sangat Baik
2	Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Tersedianya biaya operasional kendaraan dinas kantor	%	100	77,12	77,12	Cukup
III	Meningkatnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan						
1	Penyusunan laporan perencanaan dan keuangan	Tersusunnya laporan perencanaan dan keuangan	%	100	94,06	94,06	Sangat Baik

IV	Meningkatnya Kantrantibmas dan konflik pertanahan						
	Terfasilitasinya masalah trantib dan pertanahan	Terselesainya masalah trantibmas dan pertanahan	%	100	72,97	72,97	Cukup
V	Tercapainya Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan						
1	Pelaksanaan HUT RI	Terlaksananya HUT RI	%	100	100,00	100,00	Sangat Baik
VI	Terwujudnya Pengembangan Pariwisata						
	Terselenggaranya Festival Langkisau	Terlaksananya Festival Langkisau	%	100	99,59	99,59	Sangat Baik
VII	Tercapainya Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan keuangan Desa/Nagari						
1.	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari	Pembinaan pengelolaan Keuangan Pemerintah Nagari	%	100	76,19	76,19	Cukup
2.	Verifikasi dan Evaluasi APB Nagari	Tersusunnya APB Nagari yang baik	%	100	94,29	94,29	Sangat Baik
VIII	Tercapainya Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial						
1.	Terselenggaranya MTQ Tingkat Kabupaten	Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten	%	100	99,60	99,60	Sangat Baik
IX	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Wilayah Kecamatan						
1	Terwujudnya Pembinaan PKK Kecamatan	Terlaksananya Pembinaan PKK kecamatan, Nagari dan Jambore	%	100	83,11	83,11	Baik

		Kecamatan					
2	Terselenggaranya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong	Terlaksananya kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong di Kecamatan	%	100	71,97	71,97	Cukup
3	Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	Terciptanya Perencanaan Pembangunan Kecamatan	%	100	56,87	56,87	Kurang
4	Terwujudnya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan	Terlaksananya koordinasi Muspika dan Pembinaan kewilayahan yang paling bawah (Kampung)	%	100	29,00	29,00	Kurang
5	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	%	100	95,31	95,31	Sangat Baik
X	Pemberdayaan potensi unggulan kecamatan						
	Terfasilitasi perberdayaan program unggulan kecamatan	Terbinanya produk unggulan kecamatan	%	100	36,42	36,42	Kurang

3.2. Evaluasi dan Analisa Capaian Kinerja

Secara umum pemerintah Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021. Adapun sasaran yang telah ditetapkan pada tahun anggaran 2018 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel. 3.2. Realisasi Anggaran Tahun 2018

No.	Program dan Kegiatan	Pagu (Lap. Fungsional)		Persentase (%).
		Anggaran	Realisasi	
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	249.354.234	235.457.407	88,34
	1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14.389,164	13.290.000	92,36
	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	6.000.000	5.909.038	99,98
	3 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	63.800.000	63.245.000	99,44
	4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	7.624.250	6.261.000	82,12
	5 Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.028.076	16.028.076	100,00
	6 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	12.055.000	8.436.200	69,98
	7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan	1.677.740	1.288.000	76,77

	8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	4.080.000	2.700.000	66,18
	9	Penyediaan Makanan dan Minuman	15.670.000	15.660.600	99,94
	10	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	35.250.000	30.320.000	86,01
	11	Rapat-rapat dan Koordinasi dalam Daerah	72.980.000	72.230.000	98,97
2.		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	100.032.000	89.335.979	81,76
	1	Pengadaan Perlengkapan Rumah Dinas/jabatan	9.000.000	8.767.000	97,41
	2.	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	47.530.000	47.436.334	99,80
	3.	Pemeliharaan Rutin/berkala peralatan gedung kantor	4.000.000	2.403.061	60,08
	4.	Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas	2.000.000	1.125.000	56,25
	5.	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor	3.000.000	2.997.900	99,93
	6.	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan dinas/operasional	34.502.000	26.606.684	77,12
3.		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN	7.050.000	6.631.000	94,06
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja OPD	7.050,000	6.631.000	94,06
4		PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL	1.850.000	1.350.000	72,97
	1	Fasilitasi masalah trantib dan pertanahan	1.850.000	1.350.000	72,97

5.	PROGRAM PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN	26.830.000	26.830.000	100,00
1	Upacara HUT RI	26.830.000	26.830.000	100,00
6.	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASAN PARIWISATA	12.233.600	12.183.200	99,59
1	Pelaksanaan Festival Langkisau	12.233.600	12.183.200	99,59
7.	PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENGELOLAAN KEUANGAN DESA/NAGARI	16.107.500	13.239.200	82,19
1	Pelatihan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari	10.767.500	8.204.200	76,19
2	Verifikasi dan evaluasi APB Nagari	5.340.000	5.035.000	94,29
8.	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	66.350.000	66.085.000	99,60
1	Persiapan dan keikutsertaan MTQ tingkat Kabupaten dan kecamatan	66.350.000	66.085.000	99,60
9.	PROGRAM PEMBANGUAN WILAYAH KECAMATAN	105226.266	81.773.356	77,71
1	Pembinaan PKK Kecamatan	76.866.400	63.886.356	83,11
2	Pembinaan Bulan Bhakti Gotong Royong	7.614.420	5.480.000	71,97
3	Perencanaan Pembangunan Kecamatan	15.442.720	8.782.000	56,87
4	Koordinasi Muspika dan Pembinaan Kewilayahan	2.155.000	625.000	29,00
5	Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	3.147.726	3.000.000	95,31
10.	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI UNGGULAN KECAMATAN	3.350.000	1.220.000	36,42

1	Fasilitasi pemberdayaan program unggulan kecamatan	3.350.000	1.220.000	36,42
Jumlah		588.383.600	534.105.142	90,77

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Pemerintahan Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan merupakan Pembantu Kepala daerah dalam Melaksanakan tugas penyelenggaraan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan keluarga berencana, ketentraman dan ketertiban, pelayanan umum, dan pemberian pelayanan administrasi di tingkat kecamatan. Dengan demikian kecamatan Basa Ampek Balai Tapan sebagai suatu wilayah pemerintahan memiliki hak, wewenang, dan sekaligus kewajiban yang terbatas untuk mengukur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Adapun realisasi anggaran dan kinerja Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Pagu Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 588.383.600,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus rupiah).
2. Realisasi Anggaran belanja langsung per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 534.105.142,- (lima ratus tiga puluh empat juta seratus lima ribu seratus empat puluh dua rupiah). atau 90,77 % dari pagu anggaran.
3. Permasalahan dan Solusi pada Proses Capaian Kinerja Tahun 2018

Adapun yang menjadi permasalahan dari proses pelaksanaan kegiatan pada tahun 2018 di Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan adalah :

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran adalah :

- Penyediaan barang cetak dan penggandaan tidak terserap sepenuhnya karena blangko SPPD tidak menggunakan NCR lagi.

- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor kebutuhan kantor telah terserap dengan dana yang telah direalisasikan.
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tidak terserap sepenuhnya karena ada salah satu tabloid surat kabar tidak berlangganan lagi.
- Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor tidak terserap sepenuhnya karena tingkat kerusakan peralatan gedung kantor rendah.
- Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas tidak terserap dalam penggunaan dana karena tingkat kerusakan rumah dinas rendah.
- Fasilitasi masalah trantib dan pertanahan tidak terserap karena tingkat konflik trantibmas rendah.
- Pembinaan dan pengawasan administrasi keuangan pemerintahan nagari tidak terserap karena pemerintahan Nagari lebih banyak berkoordinasi langsung ke kecamatan.
- Pembinaan bulan bhakti gotong royong tidak terserap, karena kegiatan dilaksanakan telah tercukupi dengan dana yang telah direalisasikan.
- Perencanaan pembangunan kecamatan dana tidak terserap semua karena pemerintahan nagari lebih sering berkoordinasi langsung ke kecamatan.
- Koordinasi muspika dan pembinaan kewilayahan tidak terserap semua karena sering terjadi mutasi dan rotasi pimpinan.

- Fasilitasi pemberdayaan produk unggulan kecamatan masih rendah realisasi anggaran karena masih kurangnya inovasi produk unggulan yang muncul di nagari.

Solusi yang mesti dilakukan pada Tahun Anggaran 2018 adalah :

- Mengenai tidak terserapnya Anggaran di beberapa kegiatan akan dilakukan evaluasi dalam penganggaran pada Tahun Anggaran 2019.
- Terlebihnya pada program dan kegiatan yang belum terserap 100% pada presentase keuangannya akan dilakukan upaya peningkatan dan efektifitas penanganan anggaran kegiatan.

BAB IV

P E N U T U P

Sebagai bagian penutup dari LAKIP Pemerintah Kecamatan Basa ampek Balai Tapan Tahun 20198 dapat disimpulkan bahwa secara umum Pemerintah Kecamatan Basa ampek Balai Tapan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang signifikan atas sasaran setrategisnya. Sasaran yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan Pemerintahan Kecamatan Basa ampek Balai Tapan tahun 2018 secara keseluruhan mencapai target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian sasaran pada tahun 2018 tidak lepas dari hasil kerjasama yang baik dari seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Basa ampek Balai Tapan.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan yang demokratis di era globalisasi, yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik.

Namun demikian disadari bahwa selama tahun 2018 masih ditemui berbagai kesalahan dan kendala yang belum terselesaikan dengan baik seperti pemberian pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kecamatan Basa ampek Balai Tapan, dari waktu ke waktu senantiasa melakukan berbagai langkah untuk terus memperbaiki kinerja

pelayanan publik, baik melalui reformasi/perubahan pada tataran birokrasi, perbaikan sistem pengalokasian anggaran.

Akhir kata secara umum dapat disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021 khususnya untuk tahun 2018, yang diselaraskan dengan program dan indikator Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan tahun 2016-2021 dan terhadap Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan.

Jika terdapat indikator pencapaian yang belum memenuhi target yang ditetapkan, Kami akui semata-mata merupakan kelemahan kami, namun demikian segala kekurangan kami tentunya menjadikan motivasi untuk lebih baik lagi di kemudian hari.

Tapan, 20 Februari 2018

CAMAT BASA AMPEK BALAI TAPAN

AHMAD HIDAYAT, S.STP.MSc

NIP. 198306082001121002

